

Pendisiplinan Aparat Kampung di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Petrus Tekege¹

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, Indonesia
e-mail: petrustekegeuswinn@gmail.com

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dan empiris yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kedisiplinan pegawai. Tujuan penulisannya ini adalah memberikan gambaran informasi tentang hukum disiplin aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan empiris atau kasus. Disiplin aparat kampung Wanggarsari untuk meningkatkan kinerja sesuai UU Nomor 9 tahun 2015 dari hasil perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum maksimal dilaksanakan, karena kerja tidak disiplin, tidak sesuai dengan ketepatan penyelesaian tugas dan lain-lain sehingga peningkatan kinerja juga belum dicapai sesuai harapan, baik harapan masyarakat maupun harapan undang-undang. Kinerja aparat kampung Wanggarsari akan meningkat baik apabila Pegawai Aparat Kampung Wanggarsari menyadari dan mempraktikkan disiplin kerja secara kontinyu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keywords: Disiplin, Kinerja, Aparat Kampung, PP Nomor 53 Tahun 2010

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah dijabarkan melalui berbagai program pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertahap dan berkesinambungan. Dalam pasal 1 huruf k UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjelaskan bahwa Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota. Dari penjelasan tersebut diatas jelas bahwa Distrik mempunyai wilayah kerja yang didalamnya terdapat beberapa kampung yang sudah ada berdasarkan asal usul Kampung, yang warganya di layani pemerintah distrik sebagai tugas dan tanggungjawabnya.

Berkaitan dengan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri tersebut di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire di temukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. PNS jarang datang di kantor Distrik untuk melaksanakan tugasnya.
2. Jika PNS datang ke kantor jarang tepat waktu sehingga masyarakat kurang mendapatkan pelayanan secara baik.
3. PNS Distrik Wanggar jarang hadir di Kantor sehingga Masyarakat merasa penggan pergi ke Kantor Distrik untuk mendapatkan pelayanan sehingga mereka langsung mendatangi aparat Distrik untuk meminta pelayanan.

METODE

Fungsi dari metodologi penelitian adalah sebagai pedoman untuk mempertegas atau menjelaskan rancangan penelitian sehingga rancangan itu dapat diketahui dengan pasti mengenai langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh baik pada tahap persiapan, pengumpulan data sampai pada pengelolaan dalam rangka menganalisis terhadap data yang diperoleh dilapangan guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dengan demikian berikut beberapa langkah penelitian yang sudah



dilakukan, antara lain: Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, Yang menjadi lokasi penelitiannya adalah di kantor Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Mengacu dari teori ini maka populasi yang dipilih oleh penulis dalam rangka pengumpulan data adalah sebanyak 118 Kepala Keluarga.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka dapat diambi sampelnya 20% dari jumlah populasi.. Berdasarkan pada jumlah Populasi diatas, maka penulis mengambil sample berjumlah 20% dari jumlah populasi yang ada yaitu sebesar 26 Kepala Keluarga dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu propusive samping.

Dengan teknik pengolahan data tersebut diatas, maka penulis menggunakan Rumus perhitungan dari Anto Dayan (1973:13), sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis menyajikan data yang telah terkumpul berdasarkan daftar pertanyaan yang telah penulis berikan kepada responden untuk menjawab secara tertulis untuk melihat sejauh mana pentingnya disiplin dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintahan kampung pada Kantor Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, pada tiga indikator, antara lain Ketaatan pada jam kerja, Tanggungjawab kerja dan Prosedur Kerja. Berikut ditampilkan jawaban responden yang telah terkumpul dan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Ketaatan pada jam kerja.

Untuk mengetahui ketaatan waktu jam kerja aparat kampung Wanggarsari Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, maka perlu dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang hadir dan pulang tepat waktu

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	9	18,75
2	Kadang kadang	31	64,58
3	Tidak pernah	8	16,67
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer,2023

Dari tabel 1, Responden yang mengatakan selalu hadir dan pulang tepat waktu sebesar (18,75 %), sedangkan pada kategori jawaban kadang kadang, sebesar (64,58 %), dan pada kategori jawaban tidak pernah, hanya sebesar (16,67 %).

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran waktu kerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ada sanksi	8	16,67
2	Kadang kadang	11	22,92
3	Tidak Ada.	29	60,41
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2023

Dari tabel 2, Responden yang mengatakan selalu dikenakan sanksi apabila tidak masuk atau pulang tepat pada waktu yang ditentukan, responden yang mengatakan ada sanksi sebesar (16,67 %),

sedangkan pada kategori jawaban kadang kadang yang menjawab sebesar (22,92 %), dan pada kategori jawaban tidak ada sangsi, responden yang menjawab sebesar (60,41 %).

Tanggungjawab kerja

Tabel 3. Tanggapan Responden tentang tanggungjawab melaksanakan pekerjaan lebih cepat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	11	22,92
2	Kadang-kadang	29	60,41
3	Tidak pernah	8	16,67
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2023

Dari tabel 3, Responden yang mengatakan selalu tanggungjawab cepat memulai melaksanakan pekerjaan sebesar (22,92%), sedangkan pada kategori jawaban Kadang-kadang yang menjawab sebesar (60,41%), dan pada kategori jawaban tidak pernah, responden yang menjawab sebesar (16,67%).

Tabel 4. Tanggapan Responden tentang tanggungjawab terhadap laporan melaksanakan pekerjaan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	9	18,75
2	Kadang kadang	35	72,92
3	Tidak Pernah	4	8,33
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2023

Dari tabel 4, Responden yang mengatakan selalu ada laporan dalam melaksanakan pekerjaan sebesar (72,92%), sedangkan pada kategori jawaban kadang kadang yang menjawab sebesar (18,75%), dan pada kategori jawaban tidak pernah, responden yang menjawab sebesar (8,33%).

Pelayanan Sesuai dengan Prosedur

Tabel 5. Tanggapan Responden tentang pelayanan sesuai dengan prosedur

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sesuai	17	35,42
2	Kurang sesuai	21	43,75
3	Tidak sesuai	10	20,83
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2023

Dari tabel 5, Responden yang mengatakan pelayanan sesuai dengan prosedur sebesar (35,42%), sedangkan pada kategori jawaban kadang sesuai yang menjawab sebesar (43,75%), dan pada kategori jawaban tidak sesuai, responden yang menjawab sebesar (20,83%).

Tabel 6. Tanggapan Responden tentang teguran pimpinan dalam Prosedur pelayanan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	2	4,17
2	kadang kadang	42	87,50
3	Tidak pernah	4	8,33
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2023

Dari tabel 6, Responden yang mengatakan selalu ada teguran dari pimpinan apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur sebesar (4,17%), sedangkan pada kategori jawaban kadang

kadang yang menjawab sebesar (87,50%), dan pada kategori jawaban tidak pernah, responden yang menjawab sebesar (8,33%).

Kinerja PNS (Variabel Terikat)

Untuk mengukur tingkat kinerja aparat pemerintahan kampung dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan pelayanan kepada masyarakat, dapat diukur dari indikator dan pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 7. Tanggapan Responden tentang melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sesuai	6	12,5
2	Kurang sesuai	36	75,00
3	Tidak sesuai	6	12,5
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer,2023

Dari Tabel 4.7.diatas menunjukkan bahwa Responden yang mengatakan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar (12,5%), sedangkan pada kategori jawaban kurang sesuai yang menjawab sebesar (75,00%), dan pada kategori jawaban tidak sesuai,responden yang menjawab sebesar (12,5%).

Tabel 8. Tanggapan Responden tentang pengawasan langsung dari pimpinan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	12	25,00
2	Kadang kadang	20	41,67
3	Tidak pernah	16	33,33
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer,2023

Dari Tabel 4.8.diatas menunjukkan bahwa Responden yang mengatakan selalu ada pengawasan dari pimpinan sebesar (25,00%), sedangkan pada kategori jawaban kadang kadang yang menjawab sebesar (41,67%), dan pada kategori jawaban tidak pernah,responden yang menjawab sebesar (33,33%)

Tabel 9. Tanggapan Responden tentang ketersediaan sasaran dalam pelayanan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tersedia	11	22,92
2	Kurang tersedia	23	47,92
3	Tidak tersedia	14	29,16
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer,2023

Dari tabel 9, Responden yang mengatakan sarana selalu tersedia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatsebesar (22,92%), sedangkan pada kategori jawaban kurang tepat yang menjawab sebesar (47,92%),dan pada kategori jawaban tidak tepat,responden yang menjawab sebesar (29,16%).

Tabel 10 Tanggapan Responden tentang ketersediaan Prasarana dalam pelayanan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tersedia	4	8,33
2	Kurang tersedia	36	75,00
3	Tidak tersedia	8	16,67
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer,2023

Dari Tabel 10, Responden yang mengatakan tersedianya prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebesar (8,33%), sedangkan pada kategori jawaban kurang tersedia yang menjawab sebesar (75,00%), dan pada kategori jawaban tidak tersedia, responden yang menjawab sebesar (16,67%)

Tabel 11. Tanggapan Responden tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	12	25,00
2	Kadang kadang	29	60,42
3	Tidak pernah	7	14,58
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer,2023

Dari tabel 11, Responden yang mengatakan selalu adanya tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebesar (25%), sedangkan pada kategori jawaban Kadang kadang yang menjawab sebesar (60,42%), dan pada kategori jawaban tidak pernah, responden yang menjawab sebesar (14,58%)

Tabel 12. Tanggapan Responden tentang adanya keluhan dari masyarakat dalam pelayanan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	40	83,33
2	Kadang kadang	5	10,42
3	Tidak pernah	3	6,25
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer,2023

Dari tabel 12, Responden yang mengatakan selalu adanya keluhan dari masyarakat sebesar (83,33%), sedangkan pada kategori jawaban Kadang kadang yang menjawab sebesar (10,42%), dan pada kategori jawaban tidak pernah, responden yang menjawab sebesar (6,25%)

Tabel 13. Tanggapan Responden tentang laporan pertanggung jawaban kepada pimpinan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	10	20,83
2	Kadang kadang	35	72,92
3	Tidak pernah	3	6,25
	Jumlah	48	100

Sumber: Hasil olahan data primer,2023

Dari Tabel 13, Responden yang mengatakan selalu adanya laporan kepada pimpinan setiap melaksanakan tugas sebesar (20,83%), sedangkan pada kategori jawaban Kadang kadang yang menjawab sebesar (72,92%), pada kategori jawaban tidak pernah, responden yang menjawab sebesar (6,25%).

Pembahasan

Pentingnya Disiplin Aparat

Disiplin aparat pemerintahan kampung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, dapat diukur dari indikator sebagai berikut:

Ketaatan pada jama kerja

Pada table 1, indikator kehadiran tepat waktu hadir di kantor, terbukti dari responden yang menjawab pada kategori Kadang kadang lebih besar bila dibandingkan dengan kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (64,58%) hal ini menunjukkan bahwa PNS yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat kurang melaksanakan tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dari table 2, pertanyaan adanya sangsi yang diberikan oleh pimpinan apabila PNS kurang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, terbukti bahwa pada kategori jawaban tidak ada sangsi lebih besar bila dibandingkan dengan kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (60,41%). Hal ini menunjukkan bahwa PNS kurang diberikan atau dikenakan sanksi.

Ketepatan melaksanakan pekerjaan.

Table 3 menunjukkan bahwa ketepatan melaksanakan pekerjaan pada kantor kampung Distrik, terbukti yang menjawab pada kategori kurang tepat dalam melaksanakan pekerjaan sebesar (60,41%) hal ini menunjukkan bahwa ketepatan aparat kampung dalam melaksanakan pekerjaan sangat kurang. Ketepatan yang dimaksudkan disini adalah PNS melaksanakan tugas tidak sesuai tugasnya sehingga apa yang mereka kerjakan sering menimbulkan konflik internal di antara mereka sendiri. Sementara tabel 4 menunjukkan tentang hambatan dalam melaksanakan pekerjaan setiap hari di kantor Distrik, terbukti pada kategori jawaban selalu lebih besar dari kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (72,92%) hal ini menunjukkan bahwa setiap melaksanakan pekerjaan selalu adanya hambatan terutama pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain karena aparat datang lambat, tidak tersedia ATK yang diperlukan di kantor Distrik.

Pelayanan sesuai dengan prosedur.

Dari table 5, pertanyaan adanya adanya pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku di kantor distrik wanggar kabupaten Nabire, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kurang sesuai lebih besar dari pada kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (43,75%) hal ini menunjukkan bahwa PNS memang kurang melaksanakan tugas dengan baik. Ternyata akibat kurang adanya prasarana penunjang seperti komputer maupun alat tulis yang lain selain itu mereka kurang paham karena belum pernah diberikan penjelasan atau pelatihan Informasi dan Teknolohi (IT) oleh kepala Distrik maupun Dinas pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Distrik. Dari table 6, tentang tentang adanya teguran dari pimpinan kepada PNS yang salah atau melanggar, terbukti bahwa dari kategori jawaban yang ada pada kategori jawaban kadang kadang ada teguran dari pimpinan lebih besar dari kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (87,50%) hal ini menunjukkan bahwa perhatian pimpinan tetap ada namun belum maksimal sehingga aparat kampung menganggap pelanggaran dalam pekerjaan adalah hal biasa.

Peningkatan Kinerja

Mengukur tingkat kinerja PNS di kantor distrik Wanggar kabupaten Nabire, maka perlu dianalisis melalui indikator dan kategori jawaban responden sebagai berikut:

Melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

Dari table 7, pertanyaan apakah dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kurang sesuai lebih besar dari kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (75,00%) hal ini menunjukkan bahwa PNS dalam

melaksanakan pekerjaan di kantor Distrik kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau aturan yang telah ditetapkan. Dari table 8, \ bahwa pada pertanyaan tentang pengawasan secara langsung dari pimpinan, terbukti bahwa dari kategori jawaban responden yang ada pada kategori jawaban kadang kadang lebih besar dari kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (41,67%) hal ini menunjukkan bahwa pengawasan langsung dari pimpinan kurang dilaksanakan dengan baik sehingga kinerja kurang meningkat.

Ketepatan sasaran dalam pelayanan.

Dari table 9, tentang pertanyaan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dari responden yang ada yang mengatakan kadang kadang lebih besar dari kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (47,92%) hal ini menunjukkan bahwa PNS distrik Wanggar kabupaten Nabire dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terbukti sangat kurang, akibat dari kurangnya disiplin dari aparat kampung yang ada. Dari table 10, . pada pertanyaan penelitian tentang prasarana penunjan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kurang tersedia lebih besar dari kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (75%), hal ini menunjukkan bahwa PNS kurang melaksanakan tugas akibat dari kurangnya sarana penunjang yang baik.

Bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan.

Dari table 11, pertanyaan tentang adanya keluhan dari masyarakat kepada PNS dalam melayani masyarakat tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dari responden tersebut yang mengatakan kadang kadang lebih besar dari kategori jawaban lainnya yaitu sebesar (60,42%) hal ini menunjukkan bahwa PNS Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terbukti sangat kurang, akibat dari kurangnya disiplin dari pegawai yang ada. Dari hasil wawancara penulis dengan responden terbukti bahwa masyarakat merasa mengeluh karena tugas pelayanan kepada masyarakat tidak dilakukan dengan baik. Dari table 12, pertanyaan tentang adanya keluhan masyarakat kepada PNS dalam melakukan pelayanan, terbukti bahwa selalu adanya keluhan dari masyarakat yaitu sebesar (83,33%) responden yang mengatakan selalu, hal ini menunjukkan bahwa aparat kurang melakukan pelayanan sehingga masyarakat sudah kurang melakukan kegiatan di kantor Distrik. Dari table 13, pertanyaan tentang adanya laporan pertanggung jawaban dari aparat kampung kepada kepala Distrik setiap melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. keluha, terbukti bahwa kadang kadang laporan pertanggung jawaban dilakukan sebesar (72,92%) responden yang mengatakan selalu, hal ini menunjukkan bahwa PNS kurang melakukan koordinasi sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang.

KESIMPULAN

Kehadiran maupun sanksi dari PNS distrik wanggar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat kurang baik hal ini terbukti dari jawaban responden tentang kehairan dari PNS dalam melaksanakan tugas. Ketaatan dalam melaksanakan pekerjaan sangat kurang apalagi kurang mendapat perhatian terutama teguran dari kepala distrik Wanggar kabupaten Nabire selaku pimpinan. Terbukti dari jawaban responden yang ada PNS pemerinah Distrik sangat kurang melaksanakan tugas dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang dilakukan dengan baik. Pertanggung jawaban dari PNS sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat juga sangat kurang, begitu juga pembuatan pelaporan yang harus dilakukan kurang dilakukan dengan baik.

REFERENSI

Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Guba, Egon G dan Yvonna S. Lincoln. 2009. Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif dalam Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Haq, Mahbub ul. 1995. *Tirai Kemiskinan Tantangan – Tantangan untuk Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardojo, Antonio Pradjasto dkk. 2008. *Mendahulukan si Miskin Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasyim, Dardiri. 2008. *Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, *Jurnal Ius Quia Iustum*. 2008. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hidayat, Arief. 2017. “Nilai – Nilai Pancasila dan Mahkamah Konstitusi”. Makalah Seminar Nasional Eksistensi PDIH Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional yang berbasis Nilai – Nilai Pancasila, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.
- Indra, Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Isharyanto. 2005. *Otonomi Daerah dan Perencanaan Pembangunan di Daerah*, *Jurnal Yustisia*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Latif, Yudi, 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Moh. 2016. “Ideologi, Konstitusi dan Tata Hukum Kita”, Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- MAKALAH**
- Martitah. 2016. “Reaktualisasi Ideologi Pancasila Dalam semangat Pembentukan Hukum yang Bermoral”, Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Maryanto. 2011. *Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, *Jurnal Hukum*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Murhaini, Suriasyah. 2008. *Pemilihan Umum Legislatif Sebagai Refleksi Sistem Pemerintahan Demokrasi*, *Jurnal Konsitusi PKK Fakultas Syariah IAIN Antasari*.
- Ningsih, Sutra. 2010. *Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah dalam Otonomi Daerah Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Parson, Talcott. *The Social System*. 2005. London: Taylor and Francis e – Library.
- Purwadi, Ari. 2013. *Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Perspektif*.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rahayu, Derita Prapti. 2015. *Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia*, *Jurnal Yustisia*.
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riggs, Fred W. 1996. *Administrasi Negara – Negara Berkembang Teori Masyarakat Primatis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Romli. 2012. *Pancasila Sebagai Landasan Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa, Dan Bermasyarakat (Perspektif Makna Komprehensif)*, *Jurnal Konstitusi Kerjasama PSHK Universitas Islam Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Samekto, Adji. 2008. *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Press,
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjuhad, Miftachus. 2009. *Mengenai Ihwal Demokrasi Konstitusional*, *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Subkhan, Imam. 2014. *GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia dalam Jurnal Aspirasi*.
- Sudirman, Lu. 2016. *Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, *Journal of Judicial Review*.
- Sugarman, David dan Avrom Sherr. 2014. *Editorial Globalisation and Legal Education*, *International Journal of the Legal Profession*.

- Suteki. 2016. "Pancasila Sebagai Rechtsidee dan Dilema Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Global", Makalah Seminar Nasional "Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Todaro, Michael P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip – Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjojo, Agus (Gubernur LEMHANAS RI). 2016. "Pemantapan Nilai – Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global", Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam dan Huma.
- Wijaya, Endra Ricca Anggraeni dan Rifkiyati Bachri. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konsitusi kerjasama Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wirawan, I. B. 2014. *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yessy, Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan. 2015. *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Fiat Justicia* Jurnal Fakultas Hukum.
- Zolo, Danilo. 2004. *The Political and Legal Dilemmas of Globalisation*, *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*.
- <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>.
- <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>.
- <http://kbbi.web.id>